

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.4.2. Manfaat Praktis	17
1.5. Keaslian Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Landasan Teori.....	24
2.1.1. Teori Keadilan.....	24
2.1.1.1. Konsepsi Keadilan	24
2.1.1.2. Keadilan dalam Perspektif Pancasila.....	27
2.1.2. Teori Sistem Hukum	37
2.1.2.1. Struktur Hukum.....	38
2.1.2.2. Substansi Hukum.....	40
2.1.2.3. Budaya Hukum.....	42
2.1.3. Teori Hukum Progresif	44
2.2. Landasan Konseptual	48
2.2.1. Lingkungan Hidup.....	48
2.2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	48
2.2.1.2. Manfaat Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan.....	51
2.2.1.3. Kerusakan Lingkungan Hidup.....	52
2.2.2. Pertambangan	55
2.2.2.1. Pengertian Pertambangan	55
2.2.2.2. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	58
2.2.3. Perizinan.....	65
2.2.4. Keadilan Ekologis.....	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	73
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif.....	73
3.1.2. <i>Economic Analysis of Law</i>	74
3.2. Objek Penelitian.....	76
3.2.1. Objek Penelitian Hukum Normatif.....	76

3.2.1.1. Bahan Hukum Primer	77
3.2.1.2. Bahan Hukum Sekunder	78
3.2.1.3. Bahan Hukum Tersier	78
3.2.1.4. Bahan Non Hukum	79
3.2.2. Objek Penelitian <i>Economic Analysis of Law</i>	80
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	80
3.4. Pendekatan Penelitian	82
3.5. Analisis Kualitatif	84
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	86
4.1. Pengaturan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	86
4.1.1. Perkembangan Pengaturan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	86
4.1.1.1. Periode Pra Konsesi	86
4.1.1.2. Rezim Konsesi dan Kontrak 5A	90
4.1.1.3. Rezim Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	94
4.1.1.4. Rezim Perizinan Melalui Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi	101
4.1.2. Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Ini	104
4.1.2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara	104
4.1.2.2. Jenis Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	111
4.1.2.3. Pengaturan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara	114
4.1.2.3.1. Wilayah Tambang dan Wilayah Usaha Pertambangan	114
4.1.2.3.2. Izin Usaha Pertambangan	119
4.1.2.4. Konstitusionalitas KK dan PKP2B dalam Hukum Indonesia	122
4.1.2.5. Digitalisasi Izin Pertambangan Mineral dan Batubara	124
4.1.3. Kebijakan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	137
4.1.3.1. Izin Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup	143
4.1.3.2. Pengawasan Izin Usaha Pertambangan dan Hubungannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	149
4.1.4. Izin Pertambangan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ...	156
4.1.5. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif	156
4.2. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan Izin Pertambangan	

Mineral dan Batubara	159
4.2.1. Pelaksanaan Tata Kelola Izin Pertambangan Mineral dan Batubara.....	172
4.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Perlindungan Lingkungan Hidup ...	172
4.2.3. Keadilan Ekologis dalam Perspektif Hukum Pidana Pertambangan	175
4.2.4. Disorientasi Makna Pidana Pertambangan.....	187
4.2.5. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan .	215
4.2.6. Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Partisipasi Masyarakat.....	220
4.2.7. Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Maladministrasi Izin Pertambangan	225
4.2.7.1. Aspek Substansi Hukum.....	225
4.2.7.2. Aspek Struktur Hukum.....	229
4.2.7.3. Aspek Budaya Hukum.....	234
4.2.8. Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terkait Kasus Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara di Berbagai Negara	238
4.2.8.1. Amerika Serikat.....	238
4.2.8.2. Republik Rakyat Tiongkok	240
4.2.8.3. Negara Malaysia.....	243
4.2.8.4. Temuan Hasil Penelitian Komparatif.....	244
4.2.9. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	247
4.3. Rekonstruksi Sistem Pidana dalam Pengaturan Izin Pertambangan Mineral Batu Bara yang Berkeadilan	254
4.3.1. Analisis <i>Cost Benefit Analysis Ex-Post</i> Terhadap Kondisi Saat Ini	254
4.3.2. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	261
4.3.3. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berbasis Digital.....	265
4.3.3.1. Digitalisasi Sistem Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pertambangan	265
4.3.3.2. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan.....	269
4.3.3.3. Integrasi Sistem Pengawasan dengan <i>Database</i> Sistem Perizinan Terkait Usaha Pertambangan.....	275
4.3.3.4. Model Pengawasan yang Dapat Dicontoh.....	276
4.3.4. Rekonstruksi Sanksi Pidana untuk Mendukung Tata Kelola Pertambangan Minerba yang Ideal	280
4.3.4.1. Undang-Undang Pertambangan Sebagai Ketentuan Hukum yang Bersifat <i>Lex Specialis</i>	280
4.3.4.2. Keadilan Ekologis dalam Pengelolaan Pertambangan	287
4.3.4.3. Sanksi Pidana dan Efektivitas Pengawasan.....	290

4.3.5. Analisis <i>Cost Benefit Analysis Ex-Ante</i> Terhadap Usulan Kebijakan.....	294
BAB V PENUTUP.....	301
5.1. Kesimpulan.....	301
5.2. Saran.....	307
DAFTAR PUSTAKA.....	ix



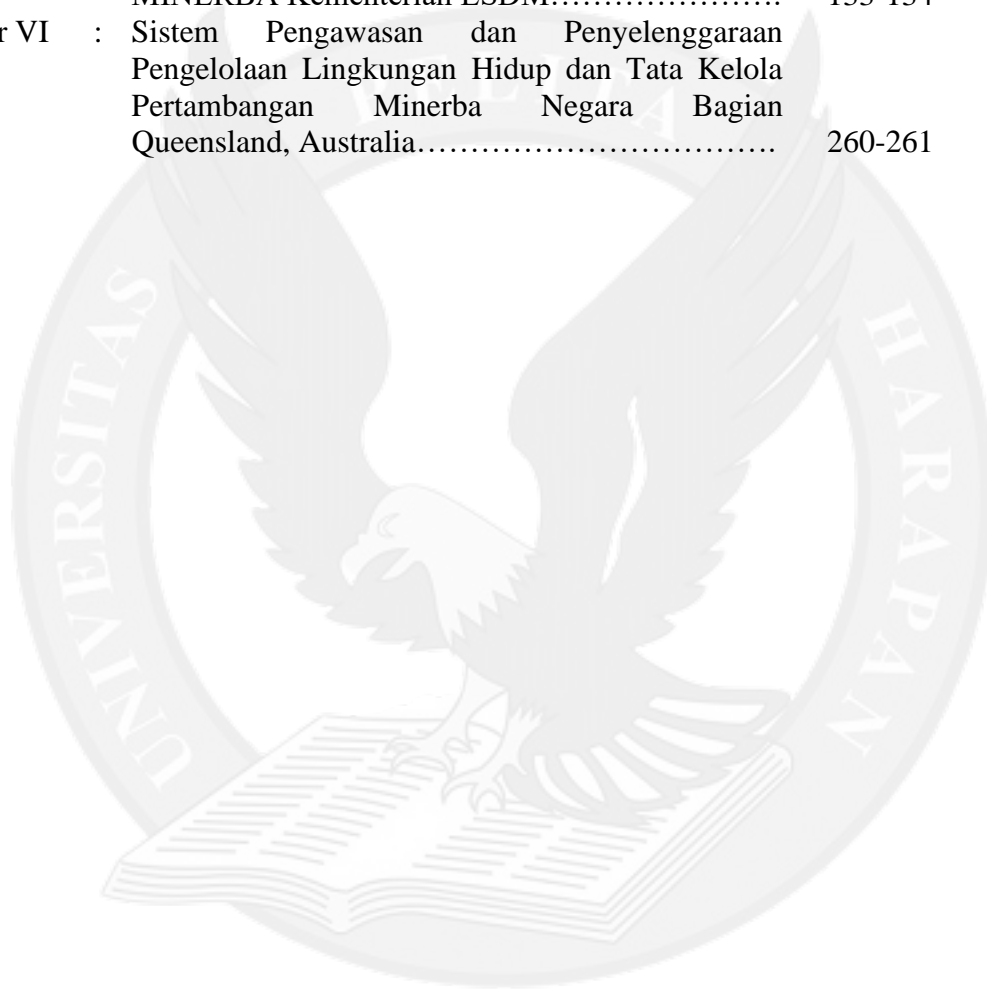
DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Ragaan <i>Stufenbau Theory</i>	36
Bagan II	: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	38
Bagan III	: Perkembangan Jumlah Perkara Hukum Sektor Pertambangan pada Periode 2013 Hingga 2017.....	187-188



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Tampilan Aplikasi MODI.....	126
Gambar II	: Tampilan Aplikasi MOMI pada <i>Smartphone</i>	129-130
Gambar III	: Tampilan Aplikasi MOMI pada Komputer.....	130
Gambar IV	: Penggunaan Peta Dunia Sebagai Peta Dasar dalam Aplikasi MOMI.....	131
Gambar V	: Tampilan Aplikasi Usaha dan Operasional MINERBA Kementerian ESDM.....	133-134
Gambar VI	: Sistem Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pertambangan Minerba Negara Bagian Queensland, Australia.....	260-261



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan <i>Lawyer</i> atau <i>Jurist</i>	46-47
Tabel II	: Perbandingan Kriteria WUP, WPR, WPN, dan WUPK.....	115-116
Tabel III	: Titik Singgung Asas dan Tujuan antara UUPPLH dengan UU Pertambangan Minerba.....	143
Tabel IV	: Sistem Sanksi dalam UUPPLH.....	152-155
Tabel V	: Pembagian Kewenangan dalam Tata Kelola Izin Pertambangan Minerba.....	159-160
Tabel VI	: IUP Minerba yang Dicabut pada Tahun 2022.....	275-277
Tabel VII	: Sanksi Pidana dalam Beberapa Ketentuan UU Pemberantasan Tipikor.....	204-205
Tabel VIII	: Perbedaan Substansi Delik Izin Pertambangan dengan Delik Korupsi dan Perkara Pertambangan dalam Konteks Tata Usaha Negara.....	212-213
Tabel IX	: Perbandingan Hukum Terkait Delik Izin Pertambangan Mineral dan Batubara.....	245
Tabel X	: Biaya dan Manfaat Masyarakat Akibat Masalah Kebijakan.....	256-257
Tabel XI	: Biaya dan Manfaat Pelaku Usaha Akibat Masalah Kebijakan.....	257
Tabel XII	: Biaya dan Manfaat Pemerintah dan APH Akibat masalah Kebijakan.....	258
Tabel XIII	: Biaya dan Manfaat Pemerintah dan APH Akibat Implementasi Kebijakan.....	296
Tabel XIV	: Biaya dan Manfaat Pelaku Usaha Akibat Implementasi Kebijakan.....	296-297
Tabel XV	: Biaya dan Manfaat Masyarakat Akibat Implementasi Kebijakan.....	297